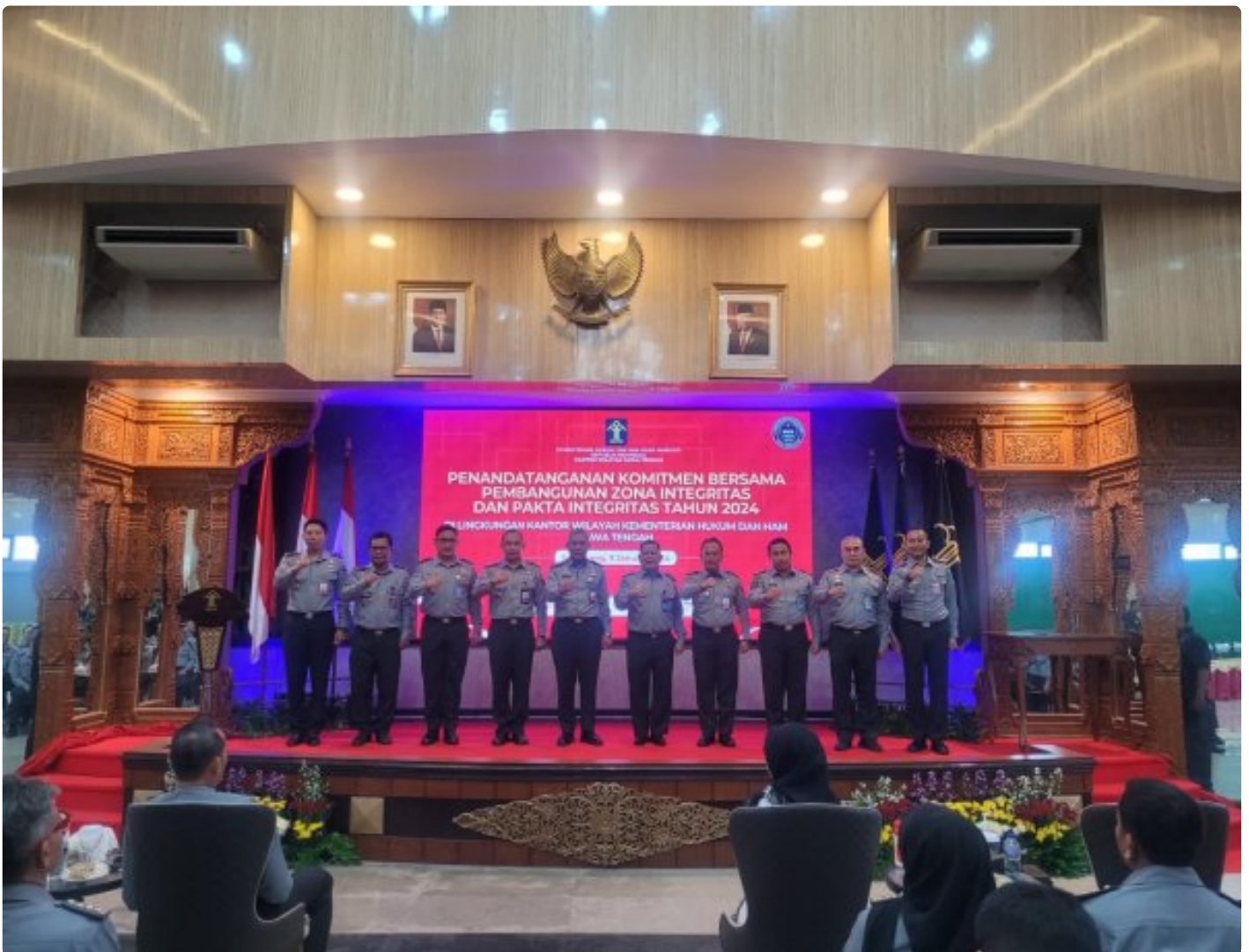


Berkomitmen Membangun Zona Integritas, Karutan Kudus Ikuti Penandatanganan Komitmen Bersama dan Penandatanganan Pakta Integritas 2024

David Fernanda Putra - KUDUS.JURNALNASIONAL.CO.ID

Jan 10, 2024 - 07:57



Dok. Humas Rutan Kudus

Semarang - Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kudus, Solichin mengikuti acara Penandatanganan Komitmen Bersama Bangunan Zona Integritas dan

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 di Lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, Selasa (09/01).

Kegiatan yang diselenggarakan di Aula Kresna Basudewa Kanwil Jawa Tengah dipimpin oleh Kepala Kantor wilayah (Kakanwil) Tejo Harwanto bersama para Kepala Divisi. Kegiatan ini Hadir pula dalam acara ini, perwakilan dari Ombudsman RI untuk memberikan penguatan.

Dalam sambutannya, Tejo mengatakan bahwa setiap tahun, Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah telah dan terus melaksanakan perjanjian kinerja, serta pembangunan zona integritas. Dua kegiatan yang memiliki muara yang sama, yaitu peningkatan kinerja dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi yang mengarah pada peningkatan pelayanan publik.

“Maka, pada kesempatan yang baik ini, saya meminta komitmen para Pimpinan Tinggi Pratama dan para Kepala UPT di wilayah Maluku Utara untuk dapat memenuhi seluruh target perjanjian kinerja,” Ujarnya.

Beliau juga meminta untuk kawal progres pencapaian perjanjian kinerja Saudara. Susun mitigasi risiko dan pengendalian secara berkala. Bangun kolaborasi dan sinergitas dengan stakeholders, lakukan layanan jemput bola kepada penerima manfaat layanan, sehingga perjanjian kinerja tersebut dapat tercapai sesuai target.

“Pembangunan zona integritas membutuhkan komitmen dan daya juang yang tinggi dari seluruh jajaran secara berkelanjutan. Kita bersama telah belajar, bahwa satker yang memiliki komitmen yang tinggi mampu melakukan transformasi, inovasi, dan akselerasi di tengah berbagai keterbatasan dalam membangun zona integritas,” ujarnya.

Beliau juga meminta agar pemenuhan data dukung RKT RB General dan Tematik Tahun 2024 patut dikawal dan dipenuhi, karena menjadi indikator penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM.